

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI DESA
PERUANDALAM KECAMATAN TAYAN HULU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018**

Hendrik^{1*}
NIM. E12112006

Dr. Bakran Suni, M.Ag² Dr. Jumadi, S.Sos, M.Si, Ph.D²

***Email: hendsosok@gmail.com**

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

2. Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Peruandalam, Kecamatan Tayan Hulu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau tahun 2018. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari: Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Sanggau, Kepala Desa Peruandalam yang dianggap lebih mengetahui dan memiliki informasi yang akurat, Ketua TPS Desa Peruandalam, Ketua KPPS Desa Peruandalam dan Ketua RT Desa Peruandalam. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Peruandalam, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, yaitu Kepala Daerah kurang menyerap hak aspirasi masyarakat, masyarakat apatis pada pemilihan Kepala Daerah, sehingga pada momen menjelang pemilihan ada sebagian memilih untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, karena Pemilih tidak memanfaatkan untuk menggunakan hak suara, dan ketidak yakinan mengenai kebijakan pemerintah akan berhasil, karena siapa pun yang dipilih belum tentu bisa mengubah keadaan daerah. Rendah untuk turut serta dalam Pemilu dikarenakan Kepala Daerah kurang tanggap atau kurang menyerap hak aspirasi masyarakat. Salah satu faktor mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Peruandalam, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, adalah disebabkan kurangnya sosialisasi tentang aturan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2018, di Desa Peruandalam, sehingga masyarakat yang kebetulan tidak berada dilingkungan domisili berdasarkan kartu tanda pendudukan (KTP) tidak mengetahui mengenai aturan Pemilu, sehingga mereka memilih menjadi Golput.

Kata Kunci: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, Partisipasi Politik, Masyarakat, Desa Peruandalam.

PENDAHULUAN

Masyarakat Desa Peruan dalam terdiri dari enam (6) Dusun merupakan sebuah komunitas adat istiadat sebagai unit struktur pemerintahan terendah di bawah Kecamatan Tayan Hulu. Secara umum proses tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, berlangsung aman dan kondusif, telah menyisakan berbagai fakta menarik berbagai isu aktual dan kontroversi baik isu positif maupun negatif, menjadi topik perbincangan oleh masyarakat di Desa Peruadalam. Telah ikut andil memberikan sumbangsih dan berpartisipasi politik secara langsung lewat surat suara, di setiap lokasi yang telah disediakan oleh panitia pemungutan suara (PPS) pada tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Desa Peruan dalam.

Meski demikian tidak dapat dimungkiri bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Desa Peruan dalam, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, menyisakan berbagai macam permasalahan, persoalan yang menjadi kendala keberlangsungan pemungutan suara selalu saja terjadi, tetapi tidak signifikan contohnya seperti kendala situasi dan kondisi infrastruktur seperti

jalan yang belum berkembang, cuaca, lambatnya distribusi logistik ke TPS, akurasi daftar pemilih dan dugaan politik uang (*money politic*).

Persoalan lainnya juga yang menjadi perhatian serius diantaranya banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang jumlah kertas Surat suaranya kurang dari jumlah DPT, serta adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara atau PNS. Selain itu sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara, banyak pemilih yang tidak mendapat undangan memilih. Kemudian adanya pembukaan kotak suara yang sudah disegel di tingkat Kelurahan/Desa. Panitia pemungutan suara (PPS) semestinya wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara.

Fenomena diatas terkait pelaksanaan Pilkada di desa Peruan Dalam, Kecamatan Tayan Hulu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau tahun 2018, merupakan proses pembelajaran patut dijadikan referensi berharga oleh masyarakat di Desa Peruan dalam dan umumnya catatan penting bagi pemerintah di daerah terutama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah

Kabupaten Sanggau. Sehingga ajang demokrasi yang sudah dilaksanakan ini tidak hanya dijadikan sebagai prosedur penyelenggaraan lima tahunan tapi sejatinya mampu menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas, prorakyat, inovatif dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Pengalaman Pilkada serentak tahun 2018, tidak hanya pembelajaran penting bagi masyarakat di Desa Peruan dalam dan pemerintah daerah serta KPUD, juga menjadi referensi penting dan menarik untuk diteliti sehingga peneliti berupaya meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Desa Peruan dalam, Kecamatan Tayan Hulu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau tahun 2018, yang sudah berlangsung kesekian kalinya.

Hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yang bersumber dari data hasil Partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Tayan Hulu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau tahun 2018. Berdasarkan suara sah yang di hasilkan dari suara kedua calon berjumlah 18.732, serta suara tidak sah dengan jumlah 812

suara sedangkan total suara berjumlah 19.545 (100%).

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan hasil rekapitulasi data partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Tayan Hulu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau tahun 2018. Berdasarkan pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 25.226, yang terdaftar di 92 tempat pemungutan suara (TPS), sedangkan Jumlah partisipasi berdasarkan persentase 77.75%, jumlah suara sah 18.732 suara, serta jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 812 suara dengan total suara 19.545 atau 100%.

Informasi data tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Tayan Hulu, dapat dilihat suara yang di peroleh dari masing-masing kedua kubu, terbukti hasil peroleh dari pasangan calon no urut 1, Yansen Akun Effendy, SH.M.Si, MH dan Fransiskus Ason, SP dengan hasil perolehan suara hanya mencapai 7.278 suara, berbeda dari pasangan no urut 2 Paolus Hadi, S.IP, M.Si dan Yohanes Ontot, M.Si dengan hasil perolehan suara tertinggi dengan jumlah suara sekitar 11.410 suara.

Artinya perbandingan daya pilih konstituen dalam penyelenggaraan pesta demokrasi pada tanggal 27 juni 2018, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati antara pasangan dari calon no urut 1 dan no urut 2, menunjukkan tingginya elektabilitas pasangan calon no urut 2 yang merupakan incumbent terpilih kembali. Ada suatu fenomena yang menarik pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2018, menurut data partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Tayan Hulu, bahwa di Desa Peruan dalam, jumlah partisipasinya hanya mencapai 59.1%, artinya tingkat optimis masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, di Desa Peruan dalam, tidak mencapai angka nasional, komparasi dengan Desa yang lain angka partisipasinya melebihi angka 70%. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Peruan dalam pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau tahun 2018.

Seharusnya partisipasi politik masyarakat di Desa Peruan dalam menjadi cerminan bagi Desa-Desa yang lain, sekaligus tolak ukur sukses atau tidaknya sistem pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, karena

dengan direvisinya undang-undang berkaitan dengan Pilkada serentak, seharusnya semakin mantap tingkat partisipasi yang diberikan konstituen, oleh karena itu bila fenomena ini dibiarkan terus-menerus oleh pemerintah daerah dan KPUD, Kabupaten Sanggau maka tidak menutup kemungkinan tendensi tingkat partisipasi politik masyarakat di Desa Peruan dalam pada periode berikutnya akan semakin rendah.

TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi politik merupakan suatu masalah penting dipelajari terutama dalam hubungan dengan negara-negara berkembang seperti memberikan keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu kebijakan ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian sebelum menelaah lebih dalam lagi tentang definisi teori konsep partisipasi politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yang berkaitan pendapat para ahli, maka pertama-tama secara etimologis partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *Pars* yang artinya bagian dan *Capere* artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau Pemilu negara, dalam Bahasa inggris *participate* atau *participation* berarti mengambil kegiatan atau tindakan seperti memberikan suara

dalam pemilihan umum, keputusan dalam aktivitas atau Pemilu negara.

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam ada beberapa ahli yang memaparkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Budiardjo (2008:367) partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan politik. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan pemilihan umum baik secara langsung dan secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah, menghadiri kegiatan (kampanye), mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu negara yang demokrasi, partisipasi merupakan ciri khas dari modernisasi politik karena adanya keputusan politik

yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan keputusan politik, melalui kegiatan bersama dalam memberikan suara serta dengan menyalurkan hak aspirasi kepada pemerintah. Dengan kata lain, warga negara percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (*political efficacy*) Budiardjo (2008:368).

Selanjutnya menurut pendapat ahli lainnya juga mendefinisikan pengertian konsep teori partisipasi politik ialah sebagai berikut: Menurut McClosky (dalam Budiardjo 2008:367) partisipasi adalah aktivitas kegiatan sukarela dari warga negara masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participant will refer to those voluntary activities by which members a society share in the selection of rules and, directly or indirectly, in formation of public policy*). Hal ini terutama adalah tindakan mempengaruhi keputusan pemerintah sekaligus untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat (*the*

authoritative allocation of values for a society).

Sehingga dapat ditafsirkan partisipasi politik dalam kegiatan pemilihan secara langsung atau tidak langsung diperlukan alokasi anggaran sebagai pembiayaan Pemilu, yang dilakukan otoritas pemerintah daerah administratif untuk kepentingan masyarakat, misalnya anggaran dialokasikan untuk kepentingan kegiatan sosial di dalam lingkungan masyarakat yang membutuhkan perhatian dari pemerintah, kegiatan itu bisa berupa sentuhan bantuan kesehatan, pendidikan serta pembangunan fisik seperti infrastruktur dan lain-lain, dapat ditafsirkan bila hak aspirasi masyarakat diperhatikan oleh pemerintah daerah, secara antusias masyarakat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya sesuai pilihan masing-masing secara demokrasi, jika sebaliknya pemerintah kurang menyerap hak aspirasi masyarakat secara tidak langsung bisa ditafsirkan masyarakat akan apatis lebih prihatin lagi jika masyarakat tidak menggunakan hak suara di dalam kegiatan politik pada pemilihan kepala daerah dengan demikian tinggi dan rendahnya partisipasi politik yang diberikan oleh konstituen baik secara langsung atau tidak langsung selalu

dipengaruhi oleh alokasi anggaran dalam Pemilu pada pemilihan Kepala Daerah.

Dalam hubungannya dengan Negara-negara berkembang Samuel P. Huntington dan Nelson dalam *No Easy Choice: Developing Countries*. (dalam Budiarjo 2008:368) memberikan penafsiran yang lebih luas dengan berpartisipasi politik secara pribadi dengan secara langsung dan tidak langsung dalam aktivitas politik atau kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Beberapa tipologi kegiatan partisipasi menurut Milbrath dan Goel (dalam Pradja. Juha 2013:154) memaparkan bahwa partisipasi politik dibedakan dalam 4 tingkatan:

- a. Apatitis, artinya yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Hal ini disebabkan karena menurut mereka yang apatis ini menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah

- menyimpang dari yang mereka cita-citakan.
- b. Spektator, artinya orang yang sedikit-tidaknya pernah mengikuti dalam pemilihan umum.
 - c. Gladiator, artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik yakni: komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, bekerja kampanye dan aktivitas masyarakat.
 - d. Pengkeritik, yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional. Dimana kegiatan warga Negara dalam berpartisipasi politik dapat berguna pemberian suara, ikut dalam kampanye atau menjadi anggota partai politik dan lain-lain. Maka secara umum, partisipasi politik dipahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kelompok dalam kehidupan politik.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja, selain itu

juga ada anggapan masyarakat dari Pemilu yang ada dinilai menyimpang dari yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus kedalam partisipasi politik yang apatis. Pemberian suara dalam Pilbup merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang terbiasa, kegiatan ini walaupun hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain. Artinya dalam Pemilu baik langsung atau tidak langsung selalu melibatkan rakyat baik dalam kampanye atau menjadi anggota partai dan dalam aktivitas politik sehingga membuat masyarakat aktif dalam kehidupan politik.

Kemudian menurut pradja (2013:152) bahwa kegiatan partisipasi politik dapat diwujudkan dengan berbagai sikap diantaranya:

1. Kegiatan pemilihan umum, kampanye pemilihan, mencari dukungan untuk seorang kandidat.
2. Lobbying, mencakup upaya perseorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah dari pemimpin politik dengan maksud memengaruhi

- keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut sejumlah orang atau masyarakat.
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam organisasi yang tujuan utama adalah memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
 4. Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perseorangan yang tujuannya terhadap pejabat pemerintah dengan maksud memperoleh manfaat bagi kepentingan politik.

Menurut Huntington dan Nelson (dalam Praja 2013:152) partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat dalam keputusan politik yang merupakan suatu aktivitas, tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor menyebutkan ada dua jenis partisipasi politik yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat diantaranya:

Pertama partisipasi politik otonom adalah partisipasi yang diharapkan keikutsertaan masyarakat dalam memberikan suaranya kepada pemerintah dalam menentukan keputusan dalam aktivitas politik baik itu secara langsung atau tidak langsung guna

memberikan hak suaranya pada kegiatan pemilihan umum yang merupakan serangkaian yang diinginkan masyarakat sebagai pendukung atau pemilih, di satu sisi peran masyarakat juga menjadi pengkritik, sekiranya mereka menganggap visi dan misi pemerintah atau partai dan Kepala Daerah tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan konstituen sebagai masyarakat umum.

Kedua partisipasi mobilisasi adalah lebih mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan atau program, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Artinya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh pemberian dalam bentuk uang, kebutuhan logistik, atau berupa janji politik yang bersifat jabatan serta status sosial tertentu sehingga bisa menggerakkan, kelompok masyarakat guna mendukung calon tertentu dalam bentuk dukungan politik secara langsung pada pemilihan umum.

Terkait dengan teori konsep partisipasi politik menurut pendapat para ahli diatas, maka rendahnya partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh beberapa permasalahan terkait faktor yang mempengaruhi partisipasi politik sehingga cenderung apatis dan memicu masyarakat tidak menggunakan hak pilih, ini merupakan pekerjaan rumah

pemerintah bersama KPUD guna mengurangi permasalahan yang sering terjadi di masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah.

Pada bagian ini dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum dikaitkan dengan paparan pendapat para ahli. Partisipasi politik yang rendah pada umum di anggap sebagai tanda yang kurang baik, karena ditafsirkan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan, adapun faktor yang diperkirakan mempengaruhi rendahnya partisipasi politik seseorang atau masyarakat sebagai berikut:

Menurut Surbakti (1999:144) beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat ikut dan tidak mau ikut dalam Pemilu antara lain:

1. Status Sosial dan Ekonomi

Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan

politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik, dan sebaliknya jika orang memiliki status sosial dan status ekonomi rendah maka menjadi salah satu faktor penyebab seseorang atau masyarakat cenderung apatis pada kegiatan partisipasi politik.

2. Faktor Situasi

Menurut Surbakti (1999:144) situasi politik juga di pengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi faktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.

3. Kesadaran politik dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah, yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara, menyangkut sikap kepercayaan kepada pemerintah daerah, yang di maksud dengan sikap kepercayaan ialah penilaian masyarakat terhadap pemerintah dalam hal ini masyarakat miliki kesadaran kepada pemerintah daerah, adalah penilaian masyarakat terhadap pemerintah apakah seseorang atau masyarakat percaya

dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan atau dalam pelaksanaan pemerintahan.

Terkait sikap kesadaran politik yaitu keikutsertaan berpartisipasi politik baik langsung atau tidak langsung yang terkadang dibangun atas dasar status sosial atau ekonomi, situasi, kepercayaan terhadap pemerintah, misalnya secara fundamental bila kebutuhan ekonomi tidak dipenuhi maka dapat diyakini timbul sikap apatis atau acuh tidak acuh, merujuk pada rasa kecewa sehingga sebab mengapa seseorang atau masyarakat tidak memberikan hak suaranya.

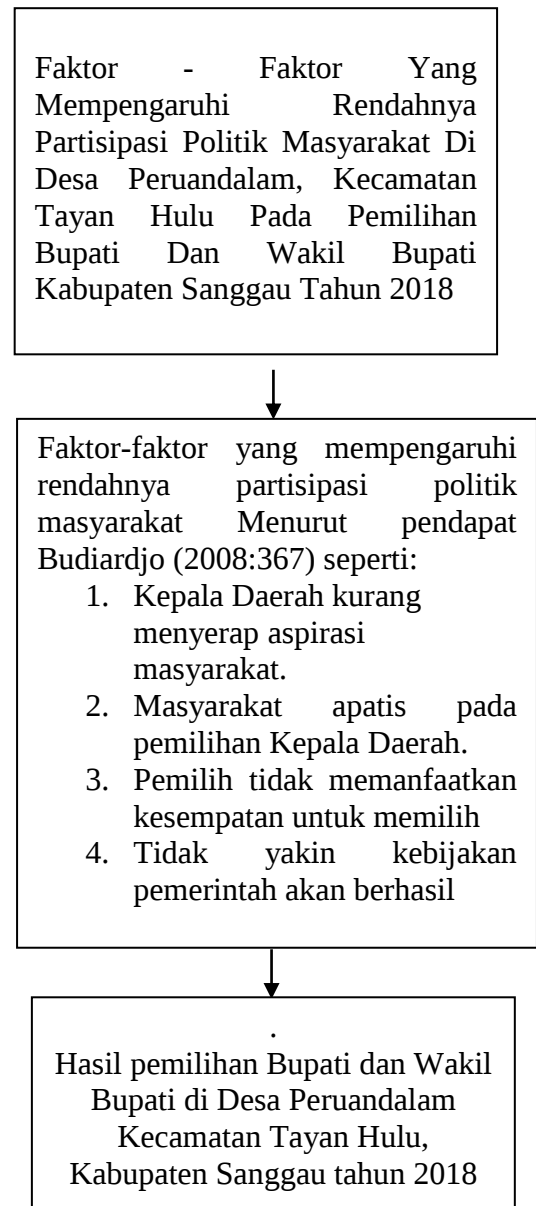
Sedangkan menurut Budiardjo (2008:369) faktor-faktor yang penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada seperti:

1. Kepala Daerah kurang menyerap aspirasi masyarakat.
2. Masyarakat apatis pada pemilihan Kepala Daerah
3. Pemilih tidak memanfaatkan kesempatan untuk memilih
4. Tidak yakin kebijakan pemerintah akan berhasil

Terkait paparan Budiardjo ada empat faktor yang diperkirakan penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat

Gambar 1

Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Data Olahan Penulis

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan. Subjek penelitian ini dalam penelitian ini adalah mereka yang mempunyai pengetahuan luas mengenai berbagai sektor dalam masyarakat. Subjek penelitian. dalam penelitian ini terdiri dari :

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.
3. Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepala Daerah kurang menyerap aspirasi masyarakat.

Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih atau biasa disebut golput dalam pemilihan umum dalam penyelenggaraan pilkada tersebut. Peranan warga negara, dalam artian tertentu melukiskan bentuk tertinggi dari keikutsertaan demokrasi. Karena

partisipasi yang demikian itulah maka orang-orang awam bisa mendapat pengaruh yang meliputi berbagai urusan pemerintahan. Tetapi seseorang tidak ikut ambil bagian dalam politik apabila hanya berperan sebagai warga negara. Sehingga mereka masih tetap dalam hubungannya sebagai subjek dengan pemerintah. Walaupun mereka telah menerima negara.

Warga negara yang memiliki kompetensi mempunyai peranan dalam pembuatan kebijakan politik atau kebijakan publik. Selain itu, mereka memainkan peranan penting didalam proses pembuatan keputusan, kadang mereka berperan serta untuk menggunakan beberapa bentuk ancaman baik eksplisit maupun implisit tertentu untuk mempengaruhi pejabat supaya memenuhi segala tuntutan. Dalam kompetensi politik subjek.

Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Peruan dalam, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018. ditinjau dari aspek Kepala Daerah kurang menyerap hak aspirasi masyarakat.

Informan salah satu Kepala Dusun (Wawan) yang merangkap sebagai Ketua TPS, sebagian masyarakat

Desa Peruan dalam yang tidak ikut berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Sanggau Tahun 2018, menuturkan:

“Jujur saya katakan sebagian masyarakat kami pada saat Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau tahun 2018.

Sebagian besar masyarakat tidak memilih, informasi yang saya dapatkan masyarakat kami, ada yang bekerja keladang dan bersawah juga petani sawit, ironisnya berdasarkan informasi dari masyarakat dari sekian pilkada hanya menimbulkan rasa kecewa dimana ketika pada saat kampanye kandidat cenderung terlalu mengumbar janji namun setelah terpilih tidak dibuktikan, dan tidak pernah menyerap aspirasi, jadi sebagian masyarakat ada kekecewaan kepada semua kandidat”

Hal senada diungkapkan Informan Ketua RT (Repen) Desa Peruan dalam masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Sanggau Tahun 2018, menuturkan:

“saya sebagai masyarakat Desa Peruan dalam sekaligus Ketua RT jujur adanya memang kepala

Daerah kita kurang menyerap aspirasi, contohnya saja pada saat kampanye Kepala Daerah tertentu menjanjikan sarana air bersih (air leding) dan perbaikan jalan salah satu di Dusun-Dusun yang memang harus di perbaikan karena jalannya masih berlumpur atau belum aspal, tapi sampai saat ini aspirasi kami sebagai masyarakat Desa Peruan dalam belum di realisasikan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat memilih golput dikarenakan menganggap bahwa Kepala Daerah yang terpilih kurang kurang menyerap aspirasi masyarakat, dan mereka tidak terlalu percaya terhadap calon yang maju sebagai kandidat, secara

sosiologis menyerang keyakinan pada diri pemilih dan hal itu terus berulang sehingga menciptakan stigma negative terhadap aktor -aktor yang main di panggung politik

2. Masyarakat apatis pada pemilihan Kepala Daerah.

Apatisme terhadap proses politik yang terjadi di Indonesia juga bukan hanya didasari oleh pilihan tindakan personal tapi juga merupakan sikap umum masyarakat. Ide citra politik ini tidak

berkembang dengan sendirinya, melainkan didapat dari media masa yang juga milik beberapa tokoh politik yang merangkap sebagai pengusaha. Apatisme masyarakat dalam demokrasi bukanlah masalah yang sepele, di dalam demokrasi asalkan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap penguasa, setiap rezim yang berkuasa dilegitimasi oleh pemilu.

Pemilu sebagai sumber legitimasi mengandalkan partisipasi setiap warga negara untuk ikut memilih penguasa. Ukuran kesuksesan pemilu tersebut dijadikan ukuran legitimasi bagi kekuasaan. Oleh karena itu, apatisme dianggap berbahaya bagi negara demokratis karena akan mengarah pada krisis legitimasi kekuasaan.

Terkait masyarakat apatis pada pemilihan Kepala Daerah. Berikut hasil wawancara dengan Ketua TPS/Kepala Dusun Desa Peruan dalam dalam Pilkada Kabupaten Sanggau Tahun 2018, menuturkan:

”saya hanya menjalankan tugas sebagai Ketua TPS guna mensukseskan Pilkada, masalah masyarakat yang apatis benar adanya ada bekerja pergi keladang ada yang kekebun sawit ada juga yang memanfaatkan hak pilih karena bosan dengan janji Kepala Daerah yang selalu

megubarkan janji tapi kalau sudah terpilih lupa dengan masyarakat”

Hal senada diungkapkan Informan (Repen) selaku Ketua RT masyarakat Desa Peruan dalam yang ikut berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Sanggau Tahun 2018, menuturkan:

“Sejujur nya, sebenarnya saya malas untuk memilih dalam Pilkada kemarin, tapi ya karna saya ada diberi uang oleh salah satu tim sukses kandidat, jadinya saya ikut antri untuk mencoblos di TPS, kalau bukan karena uang itu saya tidak mau repot-repot pergi mencoblos ”

Informan (Iknasius) saya sebagai Kepala Desa tidak berpanjang lebar kalau di tanyakan apakah ada masyarakat kami apatis pada Pemilihan Kepala Daerah, tahun 2018. Menurutkan:

“Saya sebagai kepala Desa melihat masyarakat kami kebanyakan keluarga menggantungkan kebutuhan ekonomi sebagai petani, mungkin itu juga yang menyebabkan mereka apatis, yang paling ironisnya adalah Kepala daerah kita kurang memperhatikan Desa

kami, mereka datang desa kami hanya pada saat kampanye saja, dalam kampanye selalu mengumbar janji tapi pada saat di pilih aspirasi kami tidak di realisasikan sampai sekarang.”

Hal yang membuat berkembangnya apatisme tidak lain adalah kelakuan para elite politik yang memperebutkan kekuasaan demi kepentingan tersendiri, Banyaknya cara kotor yang dilakukan para parpol demi memenangkan kandidatnya untuk memiliki kekuasaan dari mulai: black campaign, money politic, saling menjatuhkan lawan politik pun dilakukan oleh hampir semua partai politik

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah letih menanti perbaikan dan bosan dengan janji-janji politik. Keberadaan golput di sejumlah pemilu maupun pemilihan Kepala Daerah makin mengukuhkan ketidakpuasan rakyat terhadap parpol. Dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin memberikan efek negatif bagi para elit-elit dengan menghambur-hamburkan uang dalam waktu sekejap, demi kekuasaan semata. Sebaliknya adalah sangat menggiurkan juga bagi masyarakat meskipun sesaat, karena itu juga masyarakat merasa

“berhutang budi” pada calon Kepala Daerah yang memberikan uang tersebut. Masyarakat pun menikmati hal tersebut dimana masyarakat senang menerima pemberian dari partai politik yang akan dan sedang dalam pemilu. jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

3. Pemilih tidak memanfaatkan kesempatan untuk memilih

Salah satu faktor mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Peruan dalam, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, adalah disebabkan karena tidak ada kesempatan memilih karena kebetulan tidak berada dilingkungan domisili.

Sosialisasi tentang aturan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahu 2018 di Desa Peruan dalam boleh di katakan sangat minim, sehingga masyarakat juga terkadang banyak yang tidak tahu sehingga banyak yang apatis, seperti halnya tentang aturan penggunaan kartu tanda pendudukan (KTP) sebagai syarat pencoblosan Pilkada saat berada dilingkungan yang bukan daerah domisili, untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara pertama peneliti dengan

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sanggau yaitu: Martinus Sumarto, SH, Beliau mengatakan,

“bahwa untuk masalah sosialisasi politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 kemarin sudah kami lakukan, saya sebagai Ketua sudah membagi tugas dan wewenang kepada bawahannya jauh hari sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Sanggau. Kewajibannya sebagai ketua KPU Kabupaten Sanggau sudah membentuk tim dan sudah bekerja sesuai rencana, tetapi kalau menjawab memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat Desa Peruan dalam itu bukan wewenangnya untuk Desa kita mempunyai Tim tersendiri yang dinamakan TPS di Desa tersebut, dan saya sudah menghimbau kepada bawahannya mengenai masalah sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau 2018 berupa baliho-baliho, spanduk dan lain-lain.

Terlebih lagi beliau mengatakan bahwa,

“KPU dalam mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sanggau 2018 itu bukan

wewenang yang penuh bagi KPU Kabupaten, dia hanya merupakan perpanjangan tangan, ini beliau katakan yang bertanggung jawab penuh adalah KPU Provinsi, dan juga selain KPU Kabupaten juga yang bertanggung jawab disini juga peran partai politik, karena ini merupakan bagian dan fungsi partai politik tersebut”

yang menjadi korban kebijakan politik pemerintah yang sedang berkuasa. Ada sebagian masyarakat yang sangat mengerti sekali dengan politik tetapi pemilu tak ubahnya hanya sandiwara politik karena hakikatnya, pemilu hanya akan menguntungkan secara politik dan ekonomi elit politik, namun tetap menyengsarakan rakyat jelata, karena tak berhasil mengubah nasib hak ekonomi, politik, hukum dan budaya. Golput muncul karena berdasarkan bahwa keberadaan pemilu dan aktivitas memilih tidak akan berdampak lebih baik pada diri pemilih. hal ini senada dengan pendapat Informan (Bapak Yason) yakni Ketua KPPS (Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara) bahwa :

“ Saat ini masyarakat cenderung tidak menggunakan hak suaranya disebabkan karena Desa ini masih terdapat banyak

masyarakat tingkat pendidikan dan ekonomi rendah sehingga lebih mementingkan kebutuhan ekonomi dan mayoritas sudah pesimis akan hasil pemilu siapapun yang akan terpilih nanti, maka tidak akan membawa perubahan apapun yang signifikan

Hal senada diungkapkan Informan (Bapak Adot) Masyarakat Desa Peruan dalam yang ikut berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Sanggau Tahun 2018, menuturkan:

“ sejujur nya, sebenarnya saya malas untuk memilih yaitu saya merasa kalau efek dari suara yang saya berikan andaikata saya memilih pergi tidak bakalan berpengaruh besar terhadap setiap hasil keputusan yang akan terjadi. Jadi daripada saya capek-capek pergi antri untuk mencoblos di TPS mending saya pergi narik ojek, saya pikir dengan itu lebih memungkinkan untuk saya dapat penghasilan dibanding capek-capek pergi mencoblos baru tidak ada di dapat apa – apa lagi selama ini jarang saya lihat Kepala Daerah turun langsung mengurus masyarakat”

Sikap masyarakat yang apatis dan memilih golput. Merupakan bentuk protes masyarakat kepada kepala daerah, mereka menganggap program kerja visi dan misi dari kepala daerah pada umumnya tidak bisa menuntaskan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian mereka tidak percaya karena kepada kepala daerah yang terdahulu yang terjerat kasus korupsi ditambah lagi calon incumbent tidak signifikan membuat perubahan, sehingga masih banyak yang masih perlu dibenahi. Dengan demikian partisipasi politik baik langsung tidak langsung sangatlah penting walaupun rendahnya partisipasi yang diberikan merupakan proses pembelajaran demokrasi ditingkat lokal.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Peruandalam, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, pertama dikarenakan rendah untuk turut serta dalam Pemilu dikarenakan Kepala Daerah kurang tanggap atau kurang menyerap hak aspirasi masyarakat. membuat mereka

semakin kritis dan rasional terhadap masalah politik serta mempunyai penolakan yang cukup tinggi terhadap calon atau kandidat yang menurut mereka tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik untuk memimpin daerah kelak

2. Apatisme masyarakat Desa Peruandalam dalam demokrasi bukanlah masalah yang sepele, hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah letih menanti perbaikan dan bosan dengan janji-janji politik. Keberadaan golput di sejumlah pemilu maupun pemilihan kepala daerah makin mengukuhkan ketidakpuasan rakyat terhadap parpol, dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin daerah.
3. Salah satu faktor mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Peruandalam, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, adalah disebabkan kurangnya sosialisasi tentang aturan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2018, di Desa Peruandalam, sehingga masyarakat yang kebetulan

Hendrik

NIM. E12112006

Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

tidak berada dilingkungan domisili berdasarkan kartu tanda pendudukan (KTP) tidak mengetahui mengenai aturan Pemilu, sehingga mereka memilih menjadi Golput.

4. Faktor terakhir yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah ketidakpercayaan masyarakat bahwa dengan suara mereka dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil, karena siapa pun yang dipilih belum tentu bisa mengubah keadaan daerah ini bisa berasal dari masyarakat yang menjadi korban kebijakan politik pemerintah yang sedang berkuasa.

Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Peruandam di sebabkan Kepala Daerah kurang menyerap hak aspirasi sehingga masyarakat menjadi apatis, maka penulis memberikan saran, diharapkan kepada Kepala Daerah agar tanggap atas hak aspirasi masyarakat sehingga masyarakat lebih atusias menggunakan hak suaranya pada saat pilkada.
2. Salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Peruandam pada pemilihan Kepala

Daerah di sebabkan banyaknya yang masyarakat apatis, terbukti berdasarkan hasil partisipasi hanya 59.1% saja, dan penulis memberikan semua Kandidat maupun Partai - Partai Politik. Hendaknya Kandidat yang sudah memperoleh kedudukan harus menunjukkan perilaku yang baik dan melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat serta menepati janji-janjinya kepada masyarakat pada saat berkampanye. Jangan memberikan janji-janji hanya pada saat masa kampanye saja, dan menjalankan semua program-program kerjanya dengan baik yang mereka berikan pada saat kampanye mereka berlangsung. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap - pelaksanaan Pemilu akan meningkat dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk aktif dan ikut dalam pemilihan.

3. Permasalahan pada pilkada di Desa Peruandam, banyaknya masyarakat tidak memanfaatkan kesempatan untuk memilih sehingga rendahnya partisipasi politik masyarakat dapat dilihat pada hasil partisipasi hanya mencapai 59.1% saja, yang menjadi faktor saran Penulis mengharapkan

dari semua pihak baik dari partai politik maupun dari semua kandidat dalam pemilihan Kepala Daerah, agar memberikan kesadaran politik kepada masyarakat, dengan memberikan pendidikan politik agar masyarakat tidak lagi pragmatis dalam menentukan pilihannya.

4. Permasalahan pada pemilihan Kepala Daerah di Desa Perumahan, sehingga masyarakat memilih untuk menggunakan hak pilih dan lebih mementingkan untuk kebutuhan ekonomi untuk pergi berkerja pada saat pemilihan, bersarakan hasil penelitian masyarakat berpendapat bahwa tidak yakin kebijakan pemerintah akan berhasil, saran penulis diharapkan juga agar pengawasan dalam pemilihan Kepala Daerah lebih diperketat agar tidak terjadi lagi intervensi dan mobilisasi masa dalam pilkada selanjutnya.

Surut, Jakarta. CV.

Rajawali,.

Sanit, Arbi.1995, *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta. Penerbit CV Rajawali.

Surbakti,Ramlan, 2012, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Sutikno,Didik,2008,*Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*,Jakarta

Suyanto, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

REFERENSI

Affan Gafar, 2012, *Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas:Pemilu Legislatif*, Jakarta:

Rusli, Karim M, 1991. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah Potret Pasang*